

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**



**KANTOR KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN
2016**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji Syukur ke Hadirat Alloh Subhanahu Wata'Allah atas Taufiq dan hidayahnya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2016 telah dapat terselesaikan penyusunannya.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD tahun 2016 ini merupakan laporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kepada Bupati selain itu juga sebagai pertanggungjawaban kinerja Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk memperbaiki dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya kami harapkan semoga LAKIP Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2016 dapat bermanfaat dalam upaya melakukan peningkatan capain kinerja.

Pasuruan, Desember 2016

Pt. Kepala Kantor KB dan PP
Kabupaten Pasuruan



SULKHAN, SH, MM
Pembina
NIP. 19600930 198203 1 004

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Kondisi Umum Keluarga Berencana	4
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika Penyusunan	7
II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan	8
A.1. Visi	8
A.2. Misi	9
A.3. Tujuan	11
A.4. Sasaran dan Indikator Kinerja	11
B. Penetapan Kinerja Tahun 2016	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	14
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Indikator Kinerja	16
B. Capaian Analisa dan Evaluasi Kinerja	17
C. Realisasi Anggaran	21
IV. PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Saran	25

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----------|---|--|
| Lampiran | 1 | Perjanjian Kinerja Kantor KB dan PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 |
| Lampiran | 2 | Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Kantor KB dan PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 |
| Lampiran | 3 | Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Kantor KB dan PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 |
| Lampiran | 4 | Rencana Strategis Kantor KB dan PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 s/d 2018 |
| Lampiran | 5 | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor KB dan PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 |

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik dimasa sekarang ini di Daerah dituntut untuk melaksanakan perubahan yang bermanfaat dan baik juga berinovatif, responsif sejalan dengan semakin berkembang dan meningkatnya tingkat kesadaran dan pola pikir masyarakat ditempatkan pada posisi yang pokok dalam mengukur keberhasilan suatu Pemerintahan atau Birokrasi Publik.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan issue aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini dimana manajemen Pemerintah tidak lagi berorientasi kepada aspek Pemerintahan, namun telah bergeser kepada aspek tata pemerintah yang baik dan beramanah.

Sejalan dengan paradikma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah yang uraiannya tercantum dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang luas kepada Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat , pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Sistem Laporan kinerja merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; penetapan Pengukuran Kinerja; pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi periode berikutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2016, merupakan Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun Anggaran. Hal ini menuntut adanya aktivitas pengelolaan data kinerja secara terus-menerus selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indikator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.

Untuk menjamin kesungguhan bagi setiap instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksinya serta sekaligus dalam memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan seluruh program kegiatan maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 67 Tahun 2008 BAB III tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan diwajibkan secara periodik menyusun akuntabilitas kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yang digariskan dalam Visi dan Misi Organisasi

A. Latar Belakang

Menguatnya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai imbas berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mendorong dan memotivasi masyarakat daerah menuntut pemerintah daerahnya masing-masing untuk memberikan pelayanan dengan mutu prima namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Dengan masih adanya praktek-praktek yang kurang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan dan buruknya persepsi masyarakat mengenai kinerja birokrasi pemerintah. Kenyataan ini memacu *negative behaviour public* yang terekam melalui aktivitas penurunan tingkat disiplin masyarakat atas pelaksanaan regulasi, peningkatan kriminalitas, dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat.

Salah satu cara agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah melaporkan hasil kinerja.

Sebagaimana pada Pelaksanaan Program KB Nasional yang merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019.

disebutkan bahwa program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) haruslah mendukung pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Di dalam Strategi Pembangunan Nasional (Dimensi Pembangunan), antar Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental).

Salah satu *outcome* yang hendak dicapai oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari *good governance*. *Outcome* tersebut diwujudkan melalui **Terciptanya keluarga kecil yang sehat dan sejahtera serta terkendalinya tingkat kepadatan penduduk**, hal ini tentu didukung pelaksanaan Program KB di lapangan yang disesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 yang menetapkan Program KB merupakan pelayanan sosial dasar.

B. Maksud dan Tujuan

Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Tujuan penyusunan LAKIP ini adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama penyelenggara an kegiatan yang direncanakan sampai dengan hasil yang dicapai dan harapannya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) selanjutnya.

C. Kondisi Umum Keluarga Berencana

Luas wilayah Kabupaten Pasuruan \pm 147.401,50 ha. Hasil Pendataan Keluarga Bulan Desember tahun 2016 terdapat jumlah penduduk sebanyak 1.614.809 jiwa dan jumlah keluarga 471.425 KK. Berarti rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga terdapat antara 3-4 jiwa. Sasaran pasangan usia subur terdapat sebanyak 339.790 dengan peserta KB aktif 247.595 atau prevalensi 72,87 %,

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di era otomomi ini sudah masuk perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan, sehingga perlu penyesuaian kondisi di Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program pembangunan yang telah disusun Visi dan Misi Daerah Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasuruan bersinergi dengan Tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.

Sampai dengan akhir tahun 2016, personil Kantor KB dan PP Kabupaten Pasuruan berjumlah 117 orang terdiri dari PNS Kabupaten sebanyak 99 orang, CPNS 2 orang, PTT (kontrak) sebanyak 2 orang dan THL sejumlah 16 orang. Dari 117 pegawai diatas Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) PNS sebanyak 83 orang dan PLKB sebanyak 4 orang, PKB/PLKB THL sejumlah 9 orang. Sedangkan 21 orang berada di Kantor KB dan PP. adapun klasifikasi pegawai berdasarkan kepangkatan dan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongan kepangkatan :

Golongan IV	sebanyak	28	orang
Golongan III	sebanyak	67	orang
Golongan II	sebanyak	4	orang
Golongan I	sebanyak	-	orang
PTT	sebanyak	2	orang
THL	sebanyak	16	orang

2. Menurut tingkat pendidikan seperti disajikan pada Tabel berikut :

Pegawai Kantor KB dan PP berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Status / banyaknya Pegawai			Jumlah (orang)
		PNS	CPNS	PTT/THL	
1.	Pasca Sarjana (S2)	7	-	-	7
2.	Sarjana	44	2	6	52
3.	Sarjana Muda (D3/D1)	9	-	1	12
4.	SLTA	36	-	10	46
5.	SLTP	1	-	1	2
6.	SD	-	-	-	-
	Jumlah	97	2	18	117

D. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 adalah :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. SK Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

E. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 dilakukan dengan membentuk *fokus grup*, yang berperan dalam merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Tahun 2013 - 2018 menjadi beberapa sasaran lengkap dengan indikator kinerjanya. Kegiatan tahun 2016 yang sudah dilaksanakan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai. Adapun sistematika penyusunan LAKIP Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam Renstra dan tingkat pencapaiannya, kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan LAKIP, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan, Landasan Hukum serta Sistematika Penyusunan LAKIP.
3. **Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan secara singkat unsur-unsur Rencana Strategik Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 – 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
4. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016, termasuk menguraikan secara sistematis tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil serta akuntabilitas keuangan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan

Perencanaan strategik Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategik tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang secara sistematis dan berkelanjutan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang memuat visi, misi tujuan dan kebijakan organisasi dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang akan timbul dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif.

Dalam perencanaan strategik termuat pula tentang strategik pengembangan sumberdaya manusia/aparatur, jaringan kerja dan lingkungan kerja yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada kondisi, potensi permasalahan, kebutuhan nyata serta aspirasi masyarakat.

Rencana Strategik berpegangan pada Misi karena Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, adapun misi Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dan Pemberdayaan Perempuan adalah :

1. Visi

Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen, masukan-masukan dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan yang mempengaruhi maka dirumuskan visi Kantor KB dan PP sebagai berikut :

“ Pelayanan Prima menuju Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keadilan Gender “

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Pernyataan Misi Kantor KB dan PP adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.
2. Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan serta kesetaraan dan keadilan Gender

Visi dan Misi diarahkan pada 5 Grand Strategi :

1. Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB
 - a. Setiap Desa/Kelurahan memiliki toga/toma yang melakukan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) KB.
 - b. Setiap Desa/Kelurahan memiliki Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang berperan aktif sebagai fasilitator KB Desa.
 - c. Seluruh Desa/Kelurahan, terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, mendapatkan pelayanan KB bermutu.
 - d. Setiap Kecamatan memiliki Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) yang aktif.
 - e. Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi (Kespro).

2. Menata Kembali Pengelolaan Program KB
 - a. Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan *outcome* yang jelas.
 - b. Menerapkan sistem informasi yang up-to-date.
 - c. Dapat tercapai sasaran program KB di wilayahnya.
 - d. Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja.
3. Memperkuat SDM Operasional Program KB
 - a. Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih.
 - b. Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB.
 - c. Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah yang memadai.
4. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelayanan KB
 - a. Setiap keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif Bina Keluarga Balita (BKB).
 - b. Setiap keluarga pra sejahtera dan sejahtera I anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif.
 - c. Setiap Kecamatan memiliki kelompok percontohan Bina Keluarga Remaja (BKR).
 - d. Seluruh Kabupaten/Kota memiliki kelompok percontohan Bina Lingkungan Keluarga.
5. Meningkatkan Pembiayaan Program KB
 - a. Program KB memperoleh prioritas penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - b. Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin.
 - c. Di setiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi swasta dengan harga terjangkau

3. Tujuan

Program kerja Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2016 disusun sebagai dokumen perencanaan kegiatan dalam tahun 2016 sebagai berikut :

a. Keluarga Berencana

1. Mewujudkan upaya pengendalian penduduk sebagai mitra pembangunan keluarga yang berkualitas.
2. Memenuhi permintaan masyarakat terhadap pelayanan KB/KR.
3. Mewujudkan Kemandirian pelayanan KB/KR
4. Mewujudkan sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
5. Mewujudkan tingkat kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui pendekatan pengendalian pertumbuhan penduduk.
6. Menyediakan data dan informasi keluarga berbasis data mikro
7. Memantapkan peran serta institusi masyarakat pedesaan dalam pelaksanaan program KB dan Keluarga Sejahtera

b. Pemberdayaan Perempuan

1. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak
2. Terwujudnya kemampuan dan kemandirian serta kualitas hidup wanita dalam pembangunan

4. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan target kinerja sasaran merujuk pada Rencana Strategis Kantor KB dan PP Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018. Merujuk pada hal tersebut bahwa target sasaran tahun 2016 adalah sebagai berikut :

B. Penetapan Kinerja 2016

Penetapan Kinerja pada rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Sebagai konsekwensi logis diberlakukannya *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006* Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada sistem penganggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan terdapat perubahan yang mendasar mengenai jumlah, rumusan, maupun pengelompokan program yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kondisi ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penyajian LAKIP. Sampai dengan tahun 2016, pada LAKIP Kantor KB PP Kabupaten Pasuruan adalah program-program yang ditetapkan dalam Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 - 2018. Pada tahun 2016, program-program tersebut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan pengembangan sitem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan daerah
5. Keluarga Berencana
6. Program Pelayanan Kontrasepsi
7. Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
8. Program Pengembangan pusat pelayanan Informasi dan konseling KRR
9. Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu padu
10. Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja penggerakan dan pembinaan program KB oleh tenaga lini lapangan.
11. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB

12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KIE Program KB.
13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
16. Peningkatan Ketrampilan Perempuan
17. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
18. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
20. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Keterkaitan antara sasaran dengan program pembangunan kabupaten berikut tolok ukurnya dapat dilihat pada uraian rencana kinerja pada masing – masing urusan pemerintahan sebagaimana terlampir pada bagian akhir laporan ini.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perencanaan Kinerja Kantor KB PP Kabupaten Pasuruan merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasar kebijakan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kantor KB PP Kabupaten Pasuruan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan dan merupakan dokumen perencanaan operasional.

Di dalam Perjanjian Kinerja berisi kegiatan-kegiatan operasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan dan sebagai rujukan dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor KB PP Kabupaten Pasuruan.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang kegiatan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja output dan outcome serta rencana dan target capaiannya.

Perjanjian Kinerja mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai :

- Operasionalisasi Visi dan Misi Kantor KB PP Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan ke dalam rencana kegiatan yang bersifat lebih operasional;
- Rincian kegiatan melalui pendanaan/sumber pembiayaan APBD Kabupaten;
- Alat bantu dalam penyusunan LAKIP.

Indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas dijabarkan seperti pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor KB PP Kabupaten Pasuruan, adalah :

- Menjamin konsistensi perencanaan dan penetapan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah;
- Menjamin komitmen terhadap kesepakatan kegiatan yang telah dibahas secara partisipatif dalam MUSRENBANG maupun antar dinas/badan/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Memperkuat landasan penentuan kegiatan tahunan Kantor KB PP secara kronologis dan berkelanjutan.

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016 disajikan pada lampiran 1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, elastis, nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Nepotisme, Kolusi dan korupsi.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ini, untuk dapat mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu " Mewujudkan melalui Terciptanya keluarga kecil yang sehat dan sejahtera serta terkendalinya tingkat kepadatan penduduk " maka indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan sasaran tersebut diatas adalah :

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu kinerja tertentu dan dapat digunakan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan program-program pembangunan yang telah disepakati dalam Arah Kebijakan Umum di Daerah. Media ini adalah alat yang paling efektif dan cepat untuk menginformasikan setiap perubahan pelaksanaan maupun kendala yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersedianya informasi yang cepat, bisa dipastikan bahwa langkah-langkah solutif dapat segera dilakukan sehingga menjamin bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan koridor yang telah disepakati dengan pihak legislatif.

1. Bidang Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera

a. Terciptanya Keluarga Kecil berkualitas melalui kesertaan ber-KB

1) Persentase jumlah peserta KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)

Pertimbangan ditetapkannya indikator ini adalah dengan semakin banyaknya akseptor KB mengindikasikan masyarakat telah peduli dan sadar untuk membentuk keluarga kecil yang sehat dan berkualitas. Program Keluarga Berencana diarahkan pada Pasangan Usia Subur (PUS).

Jumlah peserta KB Aktif pada tahun 2016 mencapai 247.595 Akseptor atau 72,87 % dari jumlah seluruh PUS sebanyak 339.790. Capaian kinerja tahun 2016 meningkat 0,13 % dibanding tahun 2015 sebesar 72,74 %.

Secara Nominal Jika dibandingkan dengan jumlah peserta KB aktif tahun 2015 yang mencapai 241.681 Akseptor, maka terjadi kenaikan jumlah peserta KB sebesar 5.914 akseptor atau sebesar 2,44 %.

Kenaikan jumlah Peserta aktif dipengaruhi oleh terbukanya akses pelayanan KB yang semakin dekat dengan masyarakat, adanya pelayanan KB momentum antara lain TNI Manunggal KB, Kesatuan Gerak PKK, Baksos IBI, Baksos Polri, Harganas, serta adanya system pelayanan KB Mobail.

Tetapi jika dilihat dari target yang ditetapkan tahun 2016 yang semestinya 71,25 % dapat tercapai 72,87 % atau tercapai 102,27 %, hal ini masih katagori **Sangat baik**

2) Prosentase Peserta KB Mandiri terhadap KB Aktif

Jumlah Peserta KB Mandiri (PA Swasta) sebesar 123.229 atau 49,77 % dari total Peserta KB Aktif sejumlah 247.595 akseptor, capaian kinerja naik 0,13 % dari target yang ditetapkan sebesar 71,25 % pada tahun 2016 sehingga nilai capaian kinerja sebesar 72,87 %, hal ini masih termasuk katagori **Sangat Baik**.

Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka sasaran 1 (satu) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yaitu **Terciptanya keluarga kecil yang sehat dan berkualitas**. menghasilkan angka capaian sebesar 102,27 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**

b. Meningkatnya keluarga sejahtera yang berkualitas

1) Persentase tahapan keluarga sejahtera

Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi pada tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu : **Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus**.

Jumlah Keluarga Pra-S dan KS-1 pada tahun 2016 mencapai 198.879 KK atau 42,19 % dari jumlah KK di Kabupaten Pasuruan yaitu sebanyak 471.425 KK. dari target yang ditetapkan 41 %. Jika dibandingkan dengan jumlah keluarga Pras S dan KS 1 tahun 2015 yang mencapai 199.695 KK atau 42,24 %, maka terjadi Penurunan jumlah keluarga miskin sebesar 816 KK atau sebesar 0,4 %. Sehingga nilai Capaian kinerja tahun 2016 tersebut adalah 42,19 %.

Dengan menurunnya ini di karenakan masih adanya perkawinan usia muda yang menghasilkan keturunan lemah dan terjadinya perkawinan sesama Pra-S dan KS-I. Namun demikian persentase ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 42,24 % berarti terjadi Kenaikan 0,05 %.

Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka sasaran 1 (satu) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yaitu “ *Terciptanya keluarga kecil yang sehat dan berkualitas* “. menghasilkan angka capaian sebesar 102,90 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

a. Fasilitasi penyelesaian kejadian/kasus KDRT

Indikator fasilitasi penyelesaian kejadian/kasus KDRT ini ditetapkan dengan pertimbangan semakin banyaknya kejadian/kasus KDRT yang difasilitasi menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.

Jumlah kasus KDRT yang difasilitasi Kantor Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan tahun 2016 sebanyak 16 kasus dengan rasio KDRT target tahun 2016 sebesar 0.014% dan menghasilkan angka capaian sebesar 0.004 % dan termasuk dalam kategori sangat berhasil. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2015 yang sebanyak 58 kasus, kasus KDRT yang mendapat fasilitasi pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebanyak 16 kasus.

Realisasi fasilitasi KDRT tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015, hal ini disebabkan karena pengaruh hasil sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan, dan Meningkatnya jejaring dan koordinasi lintas sektor terkait dalam upaya menurunkan angka KDRT di Kabupaten Pasuruan.

Disamping itu Prosentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak, menghasilkan angka capaian sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori sangat berhasil.

b. Pengembangan lembaga perlindungan perempuan

Indikator ini digunakan untuk memfasilitasi bagi korban kekerasan karena semakin baik tingkat keberdayaan perempuan di suatu wilayah ditunjukkan dengan adanya eksistensi lembaga yang peduli terhadap perlindungan perempuan.

Jumlah lembaga perlindungan perempuan aktif pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lembaga, atau 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak satu lembaga. Berbeda dengan realisasi tahun 2015, menghasilkan angka capaian sebesar 100,00 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**

Realisasi ini mengalami perubahan disebabkan karena Dalam kelembagaan diharapkan satu lembaga yang menangani Perlindungan Perempuan dan anak untuk Tingkat Kabupaten, tetapi lembaga swasta lainnya ada jalur koordinasi yang erat dengan PPT-PPA sebagai mitra dalam peningkatan Program Perlindungan perempuan dan Anak.

Capaian indikator kinerja dari masing – masing kegiatan yang ada di Kantor KB PP Kabupaten Pasuruan terdapat pada Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) seperti pada Lampiran 2.

Adapun Dokumen Pengukuran Pencapaian Sasaran dituangkan dalam bentuk formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tahun 2016, seperti terlihat pada lampiran 3.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016, maka telah dialokasikan anggaran melalui APBD Tahun 2016 dengan realisasi sebagai berikut.

1. Belanja Langsung dan Tidak Langsung :

- Pagu Anggaran	:	Rp. 13.403.228.844,-
- Realisasi	:	Rp. 11.694.206.647,-
- Prosentase	:	87,25 %

2. Belanja Tidak Langsung :

- Pagu Anggaran	:	Rp. 7.303.166.600,-
- Realisasi	:	Rp. 6.610.305.043,-
- Prosentase	:	90,51 %

3. Belanja Langsung :

- Pagu Anggaran	:	Rp. 6.100.062.244,-
- Realisasi	:	Rp. 5.083.901.604,-
- Prosentase	:	83,34 %

Dengan rincian Belanja Langsung sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	774.959.550,-	705.401.551	91,02
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	605.539.822,-	425.998.800,-	70,35
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	16.885.000,-	11.135.000,-	65,95
4.	Perencanaan Pembangunan Daerah	28.470.000,-	14.040.000,-	49,32
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	46.718.500,-	36.524.000,-	78,18
6.	Keluarga Berencana	1.559.699.000,-	1.110.286.403,-	71,19
7.	Pelayanan Kontrasepsi	16.697.000,-	8.195.000,-	49,08
8.	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	1.176.863.000,-	1.057.751.300,-	89,88
9.	Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu	86.600.000,-	85.534.000,-	98,77
10.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	371.995.000,-	337.794.000,-	90,81
11.	Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan Serta Kelengkapan	297.604.272,-	265.984.350,-	89,38
12.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	16.422.000,-	14.599.300,-	88,90
13.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	92.277.000,-	81.832.100,-	88,68
14.	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	334.066.600,-	315.269.800,-	94,37
15.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	460.494.000,-	417.529.000,-	90,67

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Keleluasaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, secara umum telah diterjemahkan dengan baik melalui penerapan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta perhatian sepenuhnya pada potensi dan keanekaragaman daerah.

Pencapaian target sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Kinerja Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2016 melalui kegiatan operasional dengan serangkaian Program dan Kegiatan yang dijalankan oleh Seksi Keluarga Berencana dan Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut :

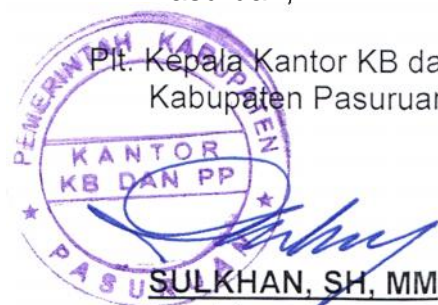
1. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a. Terciptanya Keluarga Kecil berkualitas melalui kesertaan ber-KB menghasilkan angka capaian sebesar 102,27 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.
 - b. Meningkatnya keluarga sejahtera yang berkualitas, melalui Persentase tahapan keluarga sejahtera yang Pra-S dan KS-I menghasilkan angka capaian sebesar 42.19% dan termasuk dalam kategori cukup berhasil.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 - a. Prosentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak, menghasilkan angka capaian sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori sangat berhasil.
 - b. Ratio KDRT menghasilkan angka capaian sebesar 0.004% termasuk dalam kategori sangat berhasil

B. Saran

Selanjutnya adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) :

1. untuk memberikan sumbangan pemikiran, kritik, saran dan informasi agar dalam pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah.
2. Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan kedepan mulai dari pendataan sebagai basis perencanaan yang dituangkan dalam program kerja serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan acuan dalam perumusan arah kebijakan program kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang bernuansa pada Visi dan Misi.
3. Peran serta dari lembaga – lembaga masyarakat dan swasta dalam berbagai kegiatan pembangunan terutama pada program Kependudukan dan keluarga berencana berperan penting dan strategis untuk menuju keberhasilan pembangunan dalam upaya peningkatan pengembangan jejaring kerja.
4. Memaksimalkan pelayanan keluarga berencana mendekati kepada daerah Galcilitas melalui pelayanan reguler.

Pasuruan, Desember 2016



Pt. Kepala Kantor KB dan PP
Kabupaten Pasuruan

SULKHAN, SH, MM

Pembina
NIP. 19600930 198203 1 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
(P K K)**

SKPD : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan
Tahun : 2016

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)			Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<u>Belanja tidak langsung :</u> 1. Gaji	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> Biaya gaji pokok dan tunjangan <u>OUTCOME :</u> Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai sesuai pangkat / gol.	12 bln	12 bln	100,00	7.303.166.600	6.610.305.043	90,51	Efisiensi Anggaran
2.	<u>Belanja langsung :</u> Urusan : KB dan PP 1. Program : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> Biaya listrik, telepon dan internet <u>OUTCOME :</u> Prosentase kegiatan rutin dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu	12 bln	12 bln	100,00	50.400.000	38.577.663	76,54	Efisiensi Anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> Tersedianya jasa administrasi keuangan <u>OUTCOME :</u> Prosentase kegiatan rutin dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu	12 bln	12 bln	100,00	90.000.000	75.785.000	84,21	Efisiensi Anggaran
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> ATK kantor <u>OUTCOME :</u> Prosentase kegiatan rutin dapat diselesaikan tepat waktu	12 bln	12 bln	100,00	64.830.650	49.745.800	76,73	Efisiensi Anggaran
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> Cetak blanko ² dan foto copy <u>OUTCOME :</u> Prosentase kegiatan rutin dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu	12 bln	12 bln	100,00	35.199.900	32.673.000	92,82	Efisiensi Anggaran
	5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> Lampu, peralatan listrik, Alat kebersihan & bahan pembersih	12 bln	12 bln	100,00	23.421.500	20.384.750	87,03	Efisiensi Anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Penyediaan Makanan dan Minuman	<p><u>OUTCOME</u> :</p> Prosentase kegiatan rutin dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu	12 bln	12 bln	100,00	51.907.500	36.335.250	70,00	Efisiensi Anggaran
	7. Penyediaan Jasa Perkantoran	<p><u>INPUT</u> :</p> DAU	12 bln	12 bln	100,00	254.200.000	251.137.000	98,80	Efisiensi Anggaran
	8. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	<p><u>OUTPUT</u> :</p> Makanan dan minuman rapat							
		<p><u>OUTCOME</u> :</p> Peningkatan SDM dalam kegiatan rutin pertemuan							
		<p><u>INPUT</u> :</p> DAU	12 bln	12 bln	100,00	175.000.000	174.963.088	99,98	Efisiensi Anggaran
		<p><u>OUTPUT</u> :</p> Surat kabar, majalah dan perangko, Jasa kebersihan							
		<p><u>OUTCOME</u> :</p> Prosentase kegiatan rutin dapat diselesaikan tepat waktu							
		<p><u>INPUT</u> :</p> DAU	12 bln	12 bln	100,00	175.000.000	174.963.088	99,98	Efisiensi Anggaran
		<p><u>OUTPUT</u> :</p> Perjalanan Dinas luar daerah							
		<p><u>OUTCOME</u> :</p> Prosentase kegiatan rutin dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> Perjalanan Dinas dalam daerah <u>OUTCOME :</u> Prosentase kegiatan rutin dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu	12 bln	12 bln	100,00	30.000.000	25.800.000	86,00	Efisiensi Anggaran
	2. Program : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan :								
	10. Pengadaan Mebelair	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> Almari Arsip 4 bj, kursi kerja 15 bj <u>OUTCOME :</u> meningkatkan kenyamanan kerja	1 pkt	1 pkt	100,00	23.180.000	19.750.000	85,20	Efisiensi Anggaran
	11. Pengadaan Peralatan Kantor	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> Laptop 1 Bj, printer 1 Bj, 2 UPS, 1 handycame, 1 komputer PC <u>OUTCOME :</u> Tersedianya sarana, prasarana kerja yang memadai terhadap kenyamanan kerja	1 pkt	1 pkt	100,00	71.600.000	38.700.000	54,05	Efisiensi Anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> Terpeliharanya gedung kantor <u>OUTCOME :</u> Prosentase sarana dan prasarana yg ada dgn yang diperbaiki	12 bln	12 bln	100,00	18.160.400	17.800.000	98,02	Efisiensi Anggaran
	13. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> Kendaraan Dinas Roda 4 (4 unit) dan kendaraan Roda 2 (131 unit) <u>OUTCOME :</u> Prosentase sarana dan prasarana yg memenuhi syarat terhadap sarana dan prasarana yg harus tersedia	12 bln	12 bln	100,00	457.399.422	314.578.800	68,78	Efisiensi Anggaran
	14. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> 25 Meja dan kursi <u>OUTCOME :</u> Prosentase sarana dan prasarana yang memadahi terhadap kenyamanan Kerja	12 bln	12 bln	100,00	9.000.000	9.000.000	100,00	Efisiensi Anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	<u>INPUT :</u> DAU / DAK <u>OUTPUT :</u> 12 komputer/laptop, 2 Mesin ketik & 8 AC <u>OUTCOME :</u> Prosentase sarana dan prasarana yang memadahi terhadap kenyamanan Kerja	12 bln	12 bln	100,00	26.200.000	26.170.000	99,89	Efisiensi Anggaran
	3. Program : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan :								
	16. Penilaian Angka Kredit	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> 12 bln HR, 11 paket ATK, pembinaan bagi PKB <u>OUTCOME :</u> Kenaikan pangkat pejabat fungsional dan penilaian dupak angka kredit terselesaikan	12 bln	12 bln	100,00	16.885.000	11.135.000	65,95	Efisiensi Anggaran
	4. Program : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan :								
	17. Forum SKPD	<u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> Terselenggaranya Forum SKPD	1 keg	1 keg	100,00	15.430.000	14.040.000	90,99	Efisiensi Anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18. Rapat Kerja Daerah	<p><u>OUTCOME :</u> Penyusunan Renja Tahun berikutnya</p> <p><u>INPUT :</u> DAU</p> <p><u>OUTPUT :</u> Terselenggaranya Rakerda</p> <p><u>OUTCOME :</u> Penyusunan Renja Tahun berikutnya</p>	1 keg	0	0,00	13.040.000	0	0,00	
5.	<p>Program : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</p> <p>Kegiatan :</p> <p>19. Bintek PLKB/PKB tetang R/R</p>	<p><u>INPUT :</u> DAU</p> <p><u>OUTPUT :</u> Bimbingan & Pembinaan 105 PLKB/PKB</p> <p><u>OUTCOME :</u> Tertip Pelaporan Pengendalian Lapangan Program KKB</p>	1 keg	1 keg	100,00	24.273.000	18.048.500	74,36	Efisiensi Anggaran
	20. Pelatihan Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi	<p><u>INPUT :</u> DAU</p> <p><u>OUTPUT :</u> Terlatih 120 Org (KKB/DBS)</p>	1 keg	1 keg	100,00	22.445.500	18.475.500	82,31	Efisiensi Anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Program : KELUARGA BERENCANA Kegiatan : 21. Pelayanan KIE	<p><u>OUTCOME</u> :</p> <p>Tertip Pelaporan Pengendalian Lapangan Program KKB</p> <p><u>INPUT</u> :</p> <p>DAU</p> <p><u>OUTPUT</u> :</p> <p>840 org pembinaan akseptor KB baru Ds/Kel.</p> <p><u>OUTCOME</u> :</p> <p>Prosentase kesertaan ber-KB meningkat</p>	48 Ds/KI	48 Ds/KI	100,00	39.810.000	39.740.000	98,82	
	22. Tentara Manunggal KB dan Kesehatan	<p><u>INPUT</u> :</p> <p>DAU</p> <p><u>OUTPUT</u> :</p> <p>1 paket kegiatan</p> <p><u>OUTCOME</u> :</p> <p>Prosentase kesertaan ber-KB meningkat</p>	1 keg	1 keg	100,00	114.000.000	84.849.000	74,43	
	23. KIE Berbagai Media dan Mupen	<p><u>INPUT</u> :</p> <p>DAU</p> <p><u>OUTPUT</u> :</p> <p>24 gerak dan media KIE</p> <p><u>OUTCOME</u> :</p> <p>Peningkatan ber-KB dan tersosialisasikan program KKB</p>	24 keg	24 keg	100,00	439.060.000	362.215.000	82,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	24. Peningkatan Pelayanan KB Momentum	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : 2 paket keg. Harganas dan Gerak PKK KB Kes <u>OUTCOME</u> : Peningkatan kesertaan ber-KB	3 keg	3 keg	100,00	147.979.000	137.049.000	92,61	
	25. Sosialisasi Kontrasepsi KB Rasional	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : 1 paket kegiatan 72 org <u>OUTCOME</u> : Sosialisasi / informasi pemakaian alat kontrasepsi yg rasional	1 keg	1 keg	100,00	15.000.000	13.048.000	86,99	
	26. Operasional Penyuluhan Kependudukan dan Keluarga Berencana	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : 1 paket kegiatan <u>OUTCOME</u> : Penyuluhan kependudukan dan KB	5 bln	5 bln	100,00	803.850.000	473.385.403	58,89	
7.	Program : PELAYANAN KONTRASEPSI Kegiatan :								
	27. Pelayanan KB Medis Operasi	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : 700 akseptor KB Kontap	12 bln	12 bln	100,00	11.547.000	8.195.000	70,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p><u>OUTCOME</u> :</p> Peningkatan kesertaan ber-KB							
	28. Pengayoman Kontrasepsi (Komplikasi dan Kegagalan)	<p><u>INPUT</u> :</p> DAU	6 org	0	0,00	5.150.000	0	0,00	
		<p><u>OUTPUT</u> :</p> 6 akseptor KB							
	8. Program :	<p><u>OUTCOME</u> :</p> Pengayoman terhadap akseptor KB							
	PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI								
	Kegiatan :								
	29. Pendataan Keluarga Sejahtera	<p><u>INPUT</u> :</p> DAU	365 Ds/KI	365 Ds/KI	100,00	148.475.000	71.592.500	48,22	
		<p><u>OUTPUT</u> :</p> 1 paket kegiatan							
		<p><u>OUTCOME</u> :</p> Tersedianya data Mikro Keluarga sejahtera							
	30. Temu Kader PPKBD	<p><u>INPUT</u> :</p> DAU	1 keg	1 keg	100,00	40.688.000	39.213.000	96,37	
		<p><u>OUTPUT</u> :</p> 1 paket kegiatan							
		<p><u>OUTCOME</u> :</p> KIE bagi Kader Institusi masyarakat pedesaan							
	31. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	<p><u>INPUT</u> :</p> DAU	12 keg	12 keg	100,00	879.700.000	849.751.800	96,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p><u>OUTPUT</u> :</p> <p>365 PPKBD dan 2.388 Sub PPKBD peserta pembinaan</p> <p><u>OUTCOME</u> :</p> <p>Meningkatnya kesertaan KB aktif dan KB baru</p> <p><u>INPUT</u> :</p> <p>DAU</p>	3 keg	3 keg	100,00	22.350.000	21.592.000	96,61	
	32. Gelar Produk Unggulan	<p><u>OUTPUT</u> :</p> <p>3 paket kegiatan</p> <p><u>OUTCOME</u> :</p> <p>Meningkatnya usaha ekonomi kelp. UPPKS</p>							
	33. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	<p><u>INPUT</u> :</p> <p>DAU</p> <p><u>OUTPUT</u> :</p> <p>Pelayanan keluarga sejahtera</p> <p><u>OUTCOME</u> :</p> <p>Terlayaninya konsultasi ttg keluarga sejahtera</p>	12 bln	0	0,00	5.650.000	0	0,00	
	34. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga	<p><u>INPUT</u> :</p> <p>DAU</p> <p><u>OUTPUT</u> :</p> <p>4 paket kegiatan</p> <p><u>OUTCOME</u> :</p> <p>Pengembangan keterampilan perempuan di daerah penghasil cukai</p>	4 Ds	4 Ds	100,00	80.000.000	75.602.000	94,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Program : PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB POSYANDU PADU Kegiatan : 35. KIE kelompok BKB posyandu	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : 48 kegiatan <u>OUTCOME</u> : Meningkatkan aktifitas Kegiatan PIK Remaja	48 klp	48 klp	100,00	86.600.000	85.534.000	98,77	
10.	Program : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KB Kegiatan : 36. Pengadaan Sarana Pelayanan Klinik KB	<u>INPUT</u> : DAK <u>OUTPUT</u> : 3 paket <u>OUTCOME</u> : Meningkatkan aktifitas Kegiatan KIE	3 pkt	3 pkt	100,00	90.000.000	89.265.000	99,18	
	37. Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan	<u>INPUT</u> : DAK <u>OUTPUT</u> : 5 unit <u>OUTCOME</u> : Meningkatkan aktifitas penyuluhan KB	5 unit	5 unit	100,00	226.400.000	198.622.000	87,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	38. Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Pelayanan KB	<u>INPUT</u> : DAK	1 pkt	1 pkt	100,00	55.595.000	49.907.000	89,77	
	11. Program : PENINGKATAN DAYA JANGKAU DAN KUALITAS PENYULUHAN SERTA KELENGKAPAN Kegiatan :	<u>OUTPUT</u> : 1 paket <u>OUTCOME</u> : Membantu aktifitas kegiatan KIE							
	39. Pengadaan Sarana Kerja Bagi PKB/PLKB	<u>INPUT</u> : DAK	1 pkt	1 pkt	100,00	297.604.272	265.984.350	89,38	
	12. Program : KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN Kegiatan :	<u>OUTPUT</u> : 1 paket <u>OUTCOME</u> : Meningkatkan daya jangkau dan pemberian KIE oleh PKB/PLKB							
	40. Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait dengan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<u>INPUT</u> : DAU	1 pkt	1 pkt	100,00	16.422.000	14.599.300	88,90	
		<u>OUTPUT</u> : Terlaksananya Sosialisasi GSI <u>OUTCOME</u> : Memahami kesetaraan Gender							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>13. Program : PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN</p> <p>Kegiatan :</p> <p>41. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT</p>	<p><u>INPUT</u> :</p> <p>DAU</p> <p><u>OUTPUT</u> :</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi UU</p> <p><u>OUTCOME</u> :</p> <p>Memahami UU</p>	7 keg	7 keg	100,00	92.277.000	81.832.100	88,68	
	<p>14. Program : PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN</p> <p>Kegiatan :</p> <p>42. Pelatihan Kewirausahaan bagi Organisasi Perempuan</p>	<p><u>INPUT</u> :</p> <p>DAU</p> <p><u>OUTPUT</u> :</p> <p>Terlaksananya Pelatihan keg. Kewirausahaan</p> <p><u>OUTCOME</u> :</p> <p>Menumbuh kembangkan wirausaha bagi perempuan</p>	18 keg	18 keg	100,00	106.209.000	95.442.300	89,86	
	<p>43. Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Perempuan dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga</p>	<p><u>INPUT</u> :</p> <p>DAU</p> <p><u>OUTPUT</u> :</p> <p>Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Ekonomi keluarga</p>	23 keg	23 keg	100,00	225.170.100	219.827.500	97,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p><u>OUTCOME :</u> Memahami tentang ketrampilan usaha ekonomi keluarga</p> <p><u>INPUT :</u> DAU</p> <p><u>OUTPUT :</u> Terlaksananya lomba P2WKSS</p> <p><u>OUTCOME :</u> Tercapainya pembangunan desa</p>	1 keg	0	00,00	2.687.500	0	0,00	
15.	<p>Program :</p> <p>PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK</p> <p>Kegiatan :</p>								
	45. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Ttg Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	<p><u>INPUT :</u> DAU</p> <p><u>OUTPUT :</u> Terlaksananya Sosialisasi KKG</p> <p><u>OUTCOME :</u> Memahami kesetaraan Gender</p>	2 keg	2 keg	100,00	40.000.000	36.073.000	90,18	
	46. Evaluasi Pelaksanaan PUG	<p><u>INPUT :</u> DAU</p> <p><u>OUTPUT :</u> Terlaksananya Sosialisasi Pokja Gender</p>	1 keg	1 keg	100,00	25.194.000	19.768.000	78,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p><u>OUTCOME :</u> Memahami tentang pengarusutamaan Gender</p> <p><u>INPUT :</u> DAU</p> <p><u>OUTPUT :</u> Terlaksananya Kabupaten Layak Anak</p> <p><u>OUTCOME :</u> Memahaminya Kabupaten Layak Anak</p>	5 keg	5 keg	100,00	145.300.000	120.542.400	82,96	
		<p><u>INPUT :</u> DAU</p> <p><u>OUTPUT :</u> 1 kegiatan</p> <p><u>OUTCOME :</u> Menguatkan fungsi kelembagaan PPT-PPA</p>	1 keg	1 keg	100,00	250.000.000	241.145.600	96,46	
16.	<p>Program : PENGEMBANGAN PUSAT LAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR</p> <p>Kegiatan :</p>								
	49. Pembinaan Anggota PIK KRR	<p><u>INPUT :</u> DAU</p> <p><u>OUTPUT :</u> 48 kegiatan</p> <p><u>OUTCOME :</u> Meningkatkan pengetahuan kelompok PIK remaja</p>	24 kec	24 kec	100,00	47.340.000	46.818.000	98,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	50. Sosialisasi PIK Remaja Berbasis Sekolah	<u>INPUT</u> : DAU	2 keg	2 keg	100,00	47.525.000	45.860.000	96,50	
		<u>OUTPUT</u> : 2 kegiatan							
		<u>OUTCOME</u> : Meningkatkan Pengetahuan Kespro PIK remaja sekolah							
	51. Jambore PIK Remaja	<u>INPUT</u> : DAU	1 keg	1 keg	100,00	39.850.000	39.112.500	98,15	
		<u>OUTPUT</u> : 1 kegiatan							
		<u>OUTCOME</u> : Meningkatkan Informasi Program melalui Jambore							
17.	Program : RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK								
	Kegiatan :								
	52. Sosialisasi Dimensi Kependudukan	<u>INPUT</u> : DAU	1 keg	1 keg	100,00	28.410.000	25.450.000	89,58	
		<u>OUTPUT</u> : 1 kegiatan							
		<u>OUTCOME</u> : Meningkatnya pengetahuan kependudukan							
	53. Pembinaan Koalisi Kependudukan	<u>INPUT</u> : DAU	1 keg	1 keg	100,00	33.186.500	27.621.500	83,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	54. Profil Kependudukan dan Parameter Berwawasan Kependudukan	<u>OUTPUT :</u> 1 kegiatan <u>OUTCOME :</u> Meningkatnya pengetahuan kependudukan <u>INPUT :</u> DAU <u>OUTPUT :</u> 1 kegiatan <u>OUTCOME :</u> Meningkatnya pengetahuan kependudukan	1 keg	1 keg	100,00	18.460.000	11.165.000	60,48	
	JUMLAH					13.403.228.844	11.694.206.647	87,25	

Keterangan :

- Target sesuai dokumen Perjanjian Kinerja
- Realisasi kegiatan/fisik telah dilaksanakan 100%, sedangkan realisasi keuangan ada efisiensi anggaran seperti dalam tabel diatas

Pasuruan, Desember 2016

Pt. Kepala Kantor KB dan PP
Kabupaten Pasuruan



SULKHAN, SH, MM

Pembina

NIP. 19600930 198203 1 004

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
(P P S)**

SKPD : Kantor KB dan PP Kabupaten Pasuruan
Tahun : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
1.	Terciptanya Keluarga Berkualitas melalui Kesertaan ber KB	1.1. Cakupan Sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif	71,25 %	72,87 %	102,27 %
2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Berkualitas	2.1. Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra S dan KS	41,00 %	42,19 %	97,18 %
		Tingkat Pencapaian Sasaran			99,73 %
3.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	3.1. Prosentase Partisipasi Perempuan dilembaga Pemerintah	1,98 %	1,98 %	100,00
		3.2. Partisipasi angkatan kerja Perempuan	40,02 %	46,91 %	117,22 %
		3.3. Rasio KDRT	0,014 %	0,004 %	28,57 %
		3.4. Prosentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan	85,00 %	100,00 %	117,65 %
		Tingkat Pencapaian Sasaran			90,86 %

Pasuruan, Desember 2016

Plt. Kepala Kantor KB dan PP
Kabupaten Pasuruan



SULKHAN, SH, MM

Pembina

NIP. 19600930 198203 1 004

SKPD : Kantor KB dan PP Kabupaten Pasuruan

VISI : " Pelayanan Prima Menuju Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keadilan Gender "

No	Misi	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
			Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	Kegiatan Pokok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera	1. Terselenggaranya Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, dalam Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera	1. Terciptanya Keluarga Berkualitas melalui Kesertaan ber KB	1. Cakupan Sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif	1.	1. Keluarga Berencana	1. Pelayanan KIE 2. Tentara Manunggal KB dan Kesehatan 3. KIE Berbagai Media dan Mupen 4. Peningkatan Pelayanan KB Momentum 5. Sosialisasi Kontrasepsi KB Rasional 6. Operasional Penyuluhan Kependudukan dan Keluarga Berencana
						2. Pelayanan Kontrasepsi	7. Pelayanan KB Medis Operasi 8. Pengayoman Kontrasepsi (Komplikasi dan Kegagalan)
						3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	9. Pengadaan Sarana Pelayanan Klinik KB 10. Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan 11. Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Pelayanan KB

1	2	3	4	5	6	7	8
						4. Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan Serta Kelengkapan	12. Pengadaan Sarana Kerja Bagi PKB/PLKB
						5. Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	13. Sosialisasi Dimensi Kependudukan
							14. Pembinaan Koalisi Kependudukan
						6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15. Profil Kependudukan dan Parameter Berwawasan Kependudukan
							16. Bintek PLKB/PKB tetang R/R
							17. Pelatihan Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi
			2. Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Berkualitas	2. Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra S dan KS	2.	7. Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Konseling KRR	18. Pembinaan Anggota PIK KRR
						8. Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu	19. Sosialisasi PIK Remaja Berbasis Sekolah
							20. Jambore PIK Remaja
						9. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	21. KIE kelompok BKB posyandu
							22. Pendataan Keluarga Sejahtera
							23. Temu Kader PPKBD
							24. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
							25. Gelar Produk Unggulan

1	2	3	4	5	6	7	8
							26. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
							27. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga
2.	Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan Serta Kesetaraan dan Keadilan Gender	2. Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam rangka Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	3. Prosentase Partisipasi Perempuan dilembaga Pemerintah	3.	10. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	28. Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait dengan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				4. Partisipasi angkatan kerja Perempuan	4.	11. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	29. Pelatihan Kewirausahaan bagi Organisasi Perempuan
							30. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Perempuan dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga
							31. Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita dalam Keluarga Sehat dan Sejahtera
				5. Rasio KDRT	5.	12. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	32. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Ttg Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
							33. Evaluasi Pelaksanaan PUG
							34. Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak
							35. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA)

1	2	3	4	5	6	7	8
				6. Prosentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan	6.	13. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	36. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT

Pasuruan, Desember 2016

Pt. Kepala Kantor KB dan PP
Kabupaten Pasuruan



SULKHAN, SH, MM

Pembina

NIP. 19600930 198203 1 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN
(R K T)

SKPD : Kantor KB dan PP Kabupaten Pasuruan
Tahun : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terciptanya Keluarga Berkualitas melalui Kesertaan ber KB	1.1. Cakupan Sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif	71,25 %
2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Berkualitas	2.1. Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra S dan KS	41,00 %
3.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	3.1. Prosentase Partisipasi Perempuan dilembaga Pemerintah	1,98 %
		3.2. Partisipasi angkatan kerja Perempuan	40,02 %
		3.3. Rasio KDRT	0,014 %
		3.4. Prosentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan	85,00 %

Pasuruan, Desember 2016

Plt. Kepala Kantor KB dan PP
Kabupaten Pasuruan



SULKHAN, SH, MM

Pembina

NIP. 19600930 198203 1 004